

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dapat dikatakan pada saat ini tanggung jawab masing masing belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang masih dirasakan belum banyak diberdayakan. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya upaya pembangunan di bidang pendidikan, pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri.

Masyarakat sebagai stakeholder pendidikan perlu dilibatkan dalam kegiatan peyelenggaraan sekolah yang tujuannya untuk menciptakan rasa tanggung jawab, sehingga timbul rasa memiliki terhadap sekolah, bentuk dari keterlibatan masyarakat terhadap sekolah, yaitu dengan adanya komite sekolah yang berperan sebagai pertimbangan (*Advisory*), pendukung (*Supporting*), pengontrol (*controlling*), dan penghubung (*mediator*). Di bentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah.

Dewan Pendidik, khususnya Kepala Sekolah bekerjasama dengan masyarakat, baik lingkungan sekitar maupun orangtua/wali murid. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu perangkat pelaksana sistem pendidikan, suatu wadah yang menampung aspirasi masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Perangkat atau wadah inilah yang disebut sebagai Komite Sekolah (*school board*). Komite

Sekolah merupakan wakil bagi masyarakat atau orangtua/wali murid yang menjadi mitra bagi sekolah dalam membantu penyelenggaraan program pendidikan. Komite Sekolah dibentuk sesuai dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu cara pengelolaan sekolah yang pada saat ini sedang digalakkan Pemerintah, sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi yang melimpahkan sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Daerah di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan.

Strategi Kepala Sekolah sangat memegang peranan penting dalam pemberdayaan komite sekolah. Dalam hal ini adalah adanya asumsi bahwa, peran serta masyarakat kurang diberdayakan sehingga ada pendapat bahwa keberadaan komite sekolah diberbagai sekolah sangat rendah kualitasnya sehingga perlu mendapat pembinaan dari pihak yang berkompeten (Sukri: 2004). Begitu juga pendapat ICW (2004) bahwa, personil komite sekolah dipilih oleh orang-orang yang merupakan personil dari kepala sekolah, sehingga komite sekolah tidak efektif dalam melakukan perannya. Komite Sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.

Komite Sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan orang lain. Pada dasarnya posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan

kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah. Dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya.

Menjadi seorang pemimpin pendidikan, tidak saja dituntut untuk menguasai teori kepemimpinan, akan tetapi ia juga harus terampil serta memiliki strategi dalam menerapkan situasi praktis di lapangan kerja dan etos kerja yang tinggi untuk membawa lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Idealnya, jika pemimpin pendidikan selain memiliki bekal kepemimpinan dari teori dan pengakuan resmi yang bersifat ekstern, tetapi juga pembawaan potensial yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa, namun orang dapat melatihnya agar dapat menjadi seorang pemimpin pendidikan yang tangguh dan terampil berdasarkan pengalamannya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa di SDN 4 Tilango Kabupaten Gorontalo adalah salah satu sekolah yang masih perlu memerlukan perhatian dan pengelolaan secara serius karena di SDN 4 Tilango, masih ada pengurus maupun anggota komite sekolah yang pada umumnya mereka belum mengetahui dengan benar fungsi dan peran komite sekolah. Hal tersebut disebabkan karena pengurus dan anggota komite sekolah tidak menjalankan perannya masing-masing dan hanya menunggu konfirmasi dari pihak sekolah atau kepala sekolah apabila pihak sekolah membutuhkan. Sehingga, komite sekolah di SDN 4 Tilango Kabupaten Gorontalo dalam menjalankan tugasnya selalu dimediasi oleh kepala sekolah. Kepala Sekolah SDN 4 Tilango mengambil peran yang begitu penting dalam pemberdayaan Komite Sekolah.

Karena itu, kepala sekolah dengan masyarakat harus semakin cepat dan terbuka menuntut kemampuan yang lebih kreatif, inovatif dan dinamis. Kepala sekolah harus berpegang pada aturan-aturan birokratis dan berfikir secara struktural dan tidak berani melakukan inovasi untuk menyesuaikan tuntutan masyarakatnya, akan ditinggalkan oleh peminatnya. Pada masyarakat yang semakin berkembang demikian cepat dan di dalamnya terjadi kompetisi secara terbuka selalu dituntut kualitas pelayanan yang berbeda dengan masyarakat sebelumnya. Untuk itu kepala sekolah harus lebih aktif untuk mewujudkan program pelaksanaan pendidikan yang direncanakan, maka dalam pelaksanaannya diperlukan seorang kepala sekolah harus punya strategi yang dapat mempengaruhi, mendorong serta menggerakkan komponen-komponen yang ada dalam lembaga pendidikan yang dapat mengarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran asumsi di atas dalam strategi kepala sekolah dalam pemberdayaan komite sekolah. Dimana strategi merupakan pokok pangkal dalam kegiatan seorang kepala sekolah. Strategi yang baik itu harus mempunyai pedoman yang baku (*up to date*). Sebagaimana pedoman penyelenggaraan komite disekolah-sekolah. Pedoman tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) No. 044 Tahun 2002 dan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 tahun 2003. Dengan demikian Badan Penyelenggara Program Pendidikan (BP3) tidak berlaku. Di dalam Kepmendiknas No.044/IJ/2002 juga telah diatur selengkap-lengkapnyanya tentang pemberdayaan komite sekolah dan

manajemen sekolah maupun kepala sekolah dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan Judul “*Strategi Kepala Sekolah dalam Pemberdayaan Komite Sekolah di Sekolah SDN 4 Tilango Kabupaten Gorontalo*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada beberapa masalah sebagai berikut:

1. Strategi kepala sekolah memberdayakan komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam: (1) pendataan kondisi sosial ekonomi siswa, (2) pengembangan kurikulum muatan lokal, (3) peningkatan proses pembelajaran yang menyenangkan di sekolah, dan (4) memberi masukan dan pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan dan kegiatan sekolah sehingga fungsi komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan untuk mengembangkan sekolah (*advising*) dapat berjalan.
2. Strategi kepala sekolah memberdayakan komite sekolah sebagai pendukung dalam: (1) mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dengan orang tua dan anggota masyarakat, (2) melakukan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat yang dipandang mampu untuk menjadi nara sumber dalam kegiatan intrakulikuler bagi peserta didik, (3) mendukung rutinitas pemeriksaan kesehatan anak di sekolah, (4) mendukung pemberantasan penyebaran narkoba di sekolah, dan (5) mendukung pelaksanaan

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah agar komite sekolah dapat menjalankan fungsinya sebagai pendukung pengembangan sekolah (*supporting*).

3. Strategi kepala sekolah dalam memberdayakan komite sekolah sebagai pengontrol dalam: (1) pelaksanaan rapat atau pertemuan dengan dewan guru, dan (2) menanggapi hasil belajar siswa dan hal yang dilakukan apabila hasil belajar tersebut kurang memuaskan sehingga komite sekolah dapat menjalankan fungsinya sebagai pengontrol (*controlling*).
4. Strategi kepala sekolah memberdayakan komite sekolah sebagai mediator sekolah dengan stakeholder dalam: (1) membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan di sekitar sekolah, dan (2) mengadakan peninjauan tentang kemungkinan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memajukan mutu pembelajaran di sekolah agar fungsi komite sekolah sebagai mediator sekolah dengan stakeholder dapat berjalan dengan baik.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi kepala sekolah memberdayakan komite sekolah dalam memberikan pertimbangan untuk pengembangan sekolah.
2. Untuk mengetahui strategi kepala sekolah memberdayakan komite sekolah dalam mendukung pengembangan sekolah.
3. Untuk mengetahui strategi kepala sekolah memberdayakan komite sekolah dalam menjalankan fungsi kontrol di SDN 4 Tilango.

4. Untuk mengetahui strategi kepala sekolah memberdayakan komite sekolah dalam memediasi sekolah dengan stakeholder (Pemda, DPRD di dunia usaha).

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi kepala sekolah, hasil peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya peningkatan komitmen dan profesionalisme antara pihak sekolah dan orang tua.
2. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk memfasilitasi pemerintah, masyarakat dan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan.
3. Bagi dinas pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan informasi yang sifatnya ilmiah.
4. Bagi komite sekolah, hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat berguna bukan hanya untuk SDN 4 Tilango Kabupaten Gorontalo tetapi untuk semua komite yang ada di wilayah Gorontalo, sehingga tanggung jawab yang emban dapat dilakukan dengan fungsinya yaitu sebagai penghubung jabatan antara pihak sekolah dan orang tua.